BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari *weak governance system* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance.* Krisis ekonomi yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara dan Negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated,* lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Hal ini berarti bahwa *good corporate governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* sangat berkepentingan terhadap penegakan *corporate governance* di negara-negara penerima dana karena mereka menganggap bahwa *corporate governance* merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien.

Pada saat ini, pembahasan tentang proteksi investor merupakan hal yang sangat krusial. La Porta dkk., dalam Deni dkk., (2004), telah

manajer dan para pemegang saham pengelola *(controlling shareholders)* terhadap para pemegang saham minoritas dan para kreditor sangat besar. Pada saat para investor mendanai perusahaan, mereka menghadapi risiko dan kadang-kadang besar kemungkinannya bahwa *return* atas investasi yang mereka tanamkan tidak pernah material, karena para manajer dan pemegang saham pengendali melakukan ekspropiasi terhadap mereka.

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain *corporate governance* dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (OECD, (1998) dalam Indriani dan Nurkholis, 2002).

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah *(value added)* untuk semua *stakeholder.* Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan *(disclousure)* secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (YPPMI & SC, dalam Sri dan Meniek, 2003). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep

responsibility (BRT, dalam Sri dan Haris, 2003). Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasly et al., dalam Sri dan Haris, 2003).

Variabel karakteristik perusahaan yang pertama diteliti adalah ukuran perusahaan *(size)*. Salah satu yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan adalah bahwa biaya pengungkapan akan semakin menurun dengan semakin besarnya pengungkapan. Selain itu perusahaan kecil juga dibebani biaya lain yang cenderung lebih besar dibandingkan perusahaan yang besar, yaitu biaya penyebaran informasi. Perusahaan besar juga akan mengalami biaya kerugian kompetitif yang lebih kecil dibandingkan perusahaan kecil yang mungkin dapat timbul akibat dilakukannya pengungkapan (Singhvi dan Desai, 1971). Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling konsisten dilaporkan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan tahunan (Foster, 1986). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate governance* masih belum jelas arahnya. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena lebih sulit untuk dimonitor, sehingga diperlukan penerapan *corporate governance* yang lebih baik. Di samping itu, perusahaan kecil mempunyai kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal sehingga membutuhkan penerapan *corporate governance* yang baik. Semakin besar ukuran perusahaan

Tingkat pengungkapan sukarela dapat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Variasi tingkat pengungkapan tersebut lebih disebabkan oleh sensitivitas suatu industri terhadap biaya politik. Perusahaan yang lebih sensitif terhadap biaya pilitik akan terdorong untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar dibanding industri yang lain. Pengungkapan juga akan cenderung lebih tinggi pada industri-industri tertentu yang banyak diatur atau diawasi oleh badan regulator atau pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan maka semakin bagus penerapan *corporate governance*-nya.

Hubungan antara penyebaran kepemilikan dengan tingkat pengungkapan sukarela dilandasi oleh teori agensi. Berdasarkan teori tersebut, pengungkapan akan semakin besar pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih besar menyebar (Theresia, 2005). Hal tersebut terjadi karena dengan penyebaran kepemilikan, pemilik akan lebih menuntut adanya pengungkapan untuk mengawasi perilaku manajemen dibanding jika kepemilikan perusahaan bersifat terpusat. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang menyebar mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam memproduksi informasi dengan kualitas yang lebih baik dari pada perusahaan yang bersifat *owner-controlled.* Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang menyebar juga menerapkan *cooperate governance* yang lebih baik.

Studi empiris dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda. Misalnya, penelitian Daily dkk. (1998) dan

Kakabadse dkk. (2001) dan Young (2003) dalam Deni dkk. (2004) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan hasil penelitian, Berghe dan Ridder dalam Deni dkk. (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers dkk. (2003) dalam Deni dkk. (2004) yang menunjukkan hubungan positif antara *indeks corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, jenis industri, dan tingkat penyebaran kepemilikan perusahaan terhadap penerapan *corporate governance* dengan ukuran yang dikeluarkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang dipublikasikan oleh majalah SWA serta terdaftar di BEJ mulai dari tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Kinerja perusahaan diukur dengan Tobins'Q.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance*?
2. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance*?
3. Apakah tingkat penyebaran kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance*?
4. Apakah penerapan *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan *corporate governance.*
2. Pengaruh jenis industri terhadap penerapan *corporate governance.*
3. Pengaruh tingkat penyebaran kepemilikan perusahaan terhadap penerapan *corporate governance.*
4. Pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi:

1. Menambah bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penerapan *corporate governance* dan pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.